

TESIS
ADOPSI KLAUSULA *HARDSHIP* DALAM PEMBARUAN SISTEM
HUKUM KONTRAK INDONESIA



ENSALINA PAPILAYA

No.Mhs.245215347

PROGRAM STUDI MAGISTER

HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2026



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ensalina Papilaya
Nomor Mahasiswa : 245215347
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : ADOPSI KLAUSULA *HARDSHIP* DALAM
PERBARUAN SISTEM HUKUM
KONTRAK INDONESIA

Disetujui oleh :

Nama pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
-----------------	---------	--------------

1. Dr. Y. Sari, Murti W, S.H.,M.Hum	31 Maret 2026	
-------------------------------------	---------------	--

2. Dr. E. Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum	31 Maret 2026
---------------------------------------	---------------



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Ensalina Papilaya
Nomor Mahasiswa : 245215347
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : ADOPSI KLAUSULA *HARDSHIP* DALAM
PERMBARUAN SISTEM HUKUM
KONTRAK INDONESIA

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal.---

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Y. Sari ,Murti W , S.H.,M.Hum	
2. Sekretaris	Dr . E. Imma Indra Dewi .S.H.,M.Hum	
3. Anggota	Dr.Ign.Sumarsono Raharjo,S.H.,M.Hum	

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti,SH.,LLM

Mengetahui,



Fakultas Hukum

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ensalina Papilaya

No Mahasiswa : 245215347

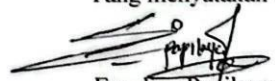
Dengan Ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“ ADOPSI KLAUSULA *HARDSHIP* DALAM PEMBARUAN SISTEM
HUKUM KONTRAK INDONESIA ”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Yang menyatakan :



Ensalina Papilaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada :

- A. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencurahkan segala berkat dan rahmat yang luar biasa kepada saya sehingga bisa menyelesaikan tesis ini
- B. Prof. Dr.Th. Anita Christiani,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- C. Dr. Y Triyana, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- D. Dr.Y .Sari Murti W ,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini
- E. Dr .E .Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini
- F. Para Dosen Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- G. Civitas Akademi Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- H. Orang tua penulis, Frans papilaya dan Hetreda papilaya / S, atas segala rasa cinta yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih atas motivasi, teguran,

nasehat, dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Tuhan memberkati.

- I. Suami Tercinta Markus Birahy yang telah menemani penulis dari awal melangkah melanjutkan studi ini, terimakasih untuk support dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penelitian tesis ini dilakukan Tuhan Yesus Memberkati .
- J. Saudari Adik/Kakak bersama istri dan ponakan yang selalu memberikan semangat, serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan caranya masing-masing membantu saya dalam proses penulisan tesis ini.

Semoga tesis yang ini mampu memberikan sumbangsih pada para pembaca . Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis. Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun Terima Kasih

Penulis

Ensalina Papilaya

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
DAFTAR ISI	vii-ix
ABSTRAK	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1-7
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9-10
E. Landasan Teori	11-12
F. Keaslian Penelitian	13-16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Penjanjian / Kontrak	17-19
B. <i>Force Majeur (Overmacht , Daya Paksa)</i>	20-22
C. Keadaan Sulit (<i>Hardship</i>)	23-36
D. Pembaruan Hukum Kontrak	36-38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39

B. Sumber Data	40
C. Metode Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data	41
E. Proses Berfikir.....	41
F. Sistematika Penulisan	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	43
1. Aspek Hukum Yang Diterapkan	44
2. Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	44
3. Prinsip Keadilan Dalam Perbandingan Klausula <i>Hardship</i>	45-46
B. Studi Kasus Pertimbangan Klausula <i>Hardship</i>	47
1. Studi Kasus Putusan Hakim yang belum mengadospi Klausula <i>hardship</i>	47-71
2. Studi Kasus Putusan Hakim Yang Telah Mengadopsi Klausula <i>Hardship</i>	66-81
3. Kajian Perbandingan Putusan Hakim Yang Belum Mengadopsi Klausula <i>Hardship</i> Dengan Yang Telah Mengadopsi Klausula <i>Hardship</i>	88-101
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim	102
1. Faktor Ekonomi	102-103
2. Itikad Baik	104
D. Pengaruh Putusan pengadilan Terhadap Praktik Hukum	105-109

BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110-111
B. Saran	111-112
DAFTAR PUSTAKA	113-117

ABSTRAK

Adopsi Klausula *Hardship* dalam Sistem Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim di Indonesia mempertimbangkan klausula *hardship* baik yang dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak maupun yang diadopsi secara implisit melalui pilihan hukum, praktik bisnis, atau prinsip internasional serta apakah perbandingan klausula tersebut sejalan dengan asas itikad baik. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan yudisial terhadap klaim *hardship*, membandingkan penerapan *hardship* eksplisit dan implisit, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berdasar rujukan internasional (mis. UPICC, praktik ICC, dan CISG). Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif kualitatif studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan dan arbitrase, Data dianalisis secara komparatif menggunakan kerangka teori itikad baik, *force majeure*, dan prinsip-prinsip internasional. Hasil menunjukkan hakim Indonesia sering menggunakan asas itikad baik (Pasal 1338 (3) KUHPerdara) dan analogi *force majeure* karena belum ada pengaturan eksplisit. Untuk *hardship* eksplisit, pengadilan lebih menghormati mekanisme renegosiasi dan penyesuaian yang disepakati untuk adopsi implisit, hakim mensyaratkan bukti ketat perubahan keadaan harus fundamental, tak terduga, di luar kendali pihak, disertai bukti kerugian nyata dan upaya mitigasi/renegosiasi. Rujukan UPICC dan praktik ICC memberikan kerangka yang lebih jelas dibanding CISG Pasal 79. Adopsi eksplisit meningkatkan kepastian adopsi implisit memberi fleksibilitas namun menimbulkan ketidakpastian. Kesimpulan Adopsi klausula *hardship* sesuai dengan asas itikad baik dan diperlukan dalam pembaruan hukum kontrak Indonesia. Rekomendasi kodifikasi klausula *hardship* mengacu UPICC, pedoman Mahkamah Agung untuk standar pembuktian, dan praktik kontrak yang mencantumkan klausula *hardship* rinci untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan kontraktual.

Kata Kunci: Klausula *Hardship*, Itikad Baik, Pembaruan Hukum Kontrak, Adopsi Eksplisit Dan Implisit, UPICC.

ABSTRACT

Adoption of the Hardship Clause in the Indonesian Contract Law Renewal System. This study examines how judges in Indonesia consider hardship clauses both explicitly included in contracts and those adopted implicitly through legal choices, business practices, or international principles and whether the comparison of these clauses is in line with the principle of good faith. The purpose of the study was to analyze judicial considerations on hardship claims, compare the application of explicit and implicit hardship, and formulate policy recommendations based on international references (e.g. UPICC, ICC practice, and CISG). The methods used are normative-qualitative approaches of literature studies, analysis of court decisions and arbitration. Data are analyzed comparatively using the theoretical framework of good faith, force majeure, and international principles. The results show that Indonesian judges often use the principle of good faith (Article 1338 (3) of the Civil Code) and the analogy of force majeure because there is no explicit regulation. For explicit hardship, the court is more deferential to the agreed renegotiation and adjustment mechanism for implicit adoption, the judge requires that strict evidence of a change in circumstances must be fundamental, unforeseen, beyond the control of the parties, accompanied by evidence of actual harm and mitigation/renegotiation efforts. The UPICC references and ICC practices provide a clearer framework than the CISG Article 79. Explicit adoption increases the certainty of implicit adoption provides flexibility but creates uncertainty. Conclusion The adoption of hardship clauses is in accordance with the principle of good faith and is necessary in the renewal of Indonesian contract law. The hardship clause codification recommendation refers to the UPICC, the Supreme Court's guidelines for evidentiary standards, and contractual practices that include detailed hardship clauses to enhance legal certainty and contractual fairness.

Keywords: hardship clause, good faith, renewal of contract law, explicit and implicit adoption, UPICC.